

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transformasi politik nasional telah merubah kerangka struktur dan kultur politik di Indonesia. Proses demokratisasi yang bergulir sejak akhir dekade 90-an telah menciptakan perubahan dalam pola relasi antara negara dan masyarakatnya (warganegara). Perubahan itu ditandai melemahnya hegemoni negara terhadap masyarakat dan pada saat yang sama terjadi penguatan partisipasi masyarakat dalam politik. Gambaran melemahnya hegemoni negara ditandai dari perubahan dalam mekanisme sistem pemerintahan yang tidak lagi berorientasi sentralistik (kekuasaan dan kewenangan terletak pada pemerintah pusat) melainkan mengarah pada desentralisasi (kekuasaan dan kewenangan tersebar pada pemerintah daerah dan lokal). Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada struktur politik yang hirarkhis, namun juga menuntut adanya sinergitas diberbagai tingkatan pemerintahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menghadirkan Undang-Undang Desentralisasi dan Otonomi Daerah merupakan penanda dari melemahnya hegemoni negara secara struktural.

Gambaran penguatan partisipasi masyarakat dalam politik tampak dari meningkatnya dinamika keterlibatan masyarakat dalam partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan aktivitas-aktivitas bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Fenomena tersebut berkembang pada era pasca gerakan

reformasi demokrasi yang mendorong ide-ide tentang kebebasan dan kesamaan hak. Dinamika keterlibatan masyarakat dalam partai politik terefleksi dari meningkatnya jumlah partai politik dalam skala nasional maupun lokal. Ekspresi kehendak politik dalam partai politik juga tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup oleh warga masyarakat. Hal itu mendorong menguatnya aktivitas partai politik dalam masyarakat yang secara tidak langsung juga mendorong hadirnya berbagai kelompok-kelompok kepentingan dengan identitas, ukuran, dan aktivitasnya bervariasi. Aktivitas kelompok kepentingan organisasional yang terwadahi dalam berbagai organisasi profesi, kepemudaan, agama, dan kemasyarakatan juga semakin terdisparitas (dari jumlah dan jenis organisasinya) dan intensif (dari ketahanan advokasi kepentingan). Gerakan-gerakan moral dan nyata yang melibatkan mobilisasi massa, seperti Front Pembela Islam, Forum Betawi Rembuk, Aliansi Buruh Indonesia, dan sebagainya, merupakan fenomena yang menunjukkan meningkatnya dinamika politik di tingkat publik. Isu-isu yang dijadikan pijakan juga bervariasi, dari isu yang berorientasi sempit dan lokal (etnisitas, agama, dan lain-lain) hingga yang berorientasi universal dan transnasional (kesetaraan gender, lingkungan hidup, anti-Narkoba, dll).

Selain dinamika kelompok kepentingan asosiasional (kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal, contohnya: Serikat Buruh, KADIN, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, Walhi, dan lain-lain), dinamika kelompok kepentingan non-asosiasional juga berkembang pesat dalam iklim demokrasi dan keterbukaan. Utamanya dalam upaya melindungi

kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau Negara. Kelompok kepentingan non-asosiasional adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir dalam institusi formal dan kegiatannya bersifat temporer (kadang-kala). Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadang-kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga dan atau pemimpin agama.

Pada era pascamodern seperti sekarang ini, ide kepentingan kelompok masyarakat awam sangat dipengaruhi atau dikonstruksi oleh informasi, teknologi dan imajinasi media massa (Budianto, 2002:3). Artinya, media massa telah memberikan andil yang besar dalam mengarahkan isu kepentingan, identitas kolektif, dan bentuk-bentuk partisipasi kelompok. Sehingga partisipasi kelompok tidak lagi hanya bersifat konvensional namun mulai mengarah pada partisipasi non konvensional. Semisal saja, ide tentang *One World, One Environment*, yang merupakan gerakan dalam sosial media yang pada akhirnya mampu menekan negara-negara dunia untuk mencari solusi terkait isu pemanasan global. Artinya, kepentingan kelompok non asosiasional memiliki cakupan isu dan bentuk partisipasi yang sangat luas.

Hasil riset Demos (<http://www.demosindonesia.org>), diunduh 8 Nopember 2005) menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat sipil dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam asosiasi politik, sosial, maupun keagamaan, tidak serta merta mendorong terjadinya peningkatan kualitas keterwakilan publik dalam institusi politik. Terdapat empat permasalahan umum dalam proses demokratisasi di Indonesia, yaitu: (1). Demokrasi hanya dimaknai sebagai liberalisasi politik

sehingga muncul kesenjangan antara aspek esensial dengan aspek instrumental. Kebebasan membentuk partai pada akhirnya menghilangkan perwakilan yang berkualitas. (2). Problem kesenjangan antara agenda masyarakat dan agenda parpol. Partai politik belum mampu melakukan institusionalisasi kepartaian baik di tingkat kelembagaan, parlemen, dan akar rumput. Gejala ini yang mungkin menjadi salah satu alasan partai politik merekrut artis dan "kalangan penekun agama" sebagai orang yang dicalonkannya. (3). Elit oligarkis yang selama ini mendominasi politik telah menyesuaikan diri dengan mekanisme demokrasi. Demokrasi cenderung menjadi ritualisme sedangkan esensinya tetap elitisme. (3). Tidak adanya kesatuan antara pemerintah dan representasi politik menunjukkan aktor-aktor politik yang terfragmentasi secara ideologi dan strategi.

Hasil penelitian demos tersebut, menegaskan bahwa institusionalisasi demokrasi tidak serta merta melahirkan praktek-praktek politik yang demokratis. Untuk mendorong praktek demokrasi, salah satu unsur utamanya adalah partisipasi masyarakat sipil yang merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sipil merupakan hal yang perlu dikaji secara lebih mendalam guna mencari penguatan-penguatan masyarakat sipil untuk mendorong praktek-praktek politik yang demokratis. Praktek partisipasi politik publik dari kelompok kepentingan non-asosiasional, merupakan salah satu tema yang dapat dikaji selain tema-tema lain yang berkaitan dengan partai politik dan partisipasi kelompok kepentingan asosiasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka partisipasi politik publik yang dimaksud adalah keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses

pembuatan kebijakan publik dan proses penyelesaian masalah publik (Agustino, 2006:102). Organisasi dan kelompok masyarakat yang melakukan gerakan sosial, berpretensi melakukan partisipasi politik, dan setiap partisipasi politik adalah perilaku politik. Oleh karenanya, blok-blok politik itu dapat dilakukan oleh beberapa kalangan, yaitu organisasi masyarakat sipil (*civil society organisations*), organisasi swadaya masyarakat (*non-government organisations*), dan organisasi-organisasi rakyat (*people organisations*) yang dapat berlangsung secara sporadis maupun terstruktur. Gerakan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menata relasi negara dan masyarakat, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik melalui gerakan-gerakan kemasyarakatan. Gerakan sosial masyarakat sipil banyak membidik dan membangkitkan isu-isu demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada komunikasi dan identitas kolektif (Hage dan Powers, 1992:68). Itu sebabnya kelompok-kelompok gerakan sosial masyarakat sipil itu, bekerja membela kepentingan publik dan mendesakkannya ke dalam proses-proses pemerintahan, tanpa menggalang diri atau menjadikannya sebagai organisasi politik.

Salah satu isu gerakan sosial yang mendunia adalah isu *“Go Green”* yang muncul di awal abad ke-20. Berawal dari isu pemanasan global yang terjadi akibat kerusakan lingkungan karena modernisasi dan industrialisasi yang berkembang di Amerika dan Eropa telah menjadi suatu gerakan politik (Bluhdorn, 2009:37-40). Secara umum, Gerakan lingkungan hidup menggambarkan bentuk aksi kesadaran manusia yang peduli terhadap kerusakan lingkungan serta berbagai

aspek tentang kehidupan manusia yang terancam akibat kerusakan lingkungan. Keterkaitan dengan negara, adalah bahwa sustainability suatu negara ditentukan oleh eksistensi kewilayahan yang mencakup lingkungan fisik (lingkungan hidup), sumber daya manusia (penduduk), dan politiknya. Itu sebabnya, isu lingkungan hidup di beberapa negara lainnya dapat berkembang menjadi gerakan politik.

Di Indonesia, gerakan lingkungan hidup sendiri bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 70-an, gerakan lingkungan hidup telah muncul dalam aksi-aksi kepemudaan yang tergabung dalam Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam), sebagai wujud perlawanan terhadap paradigma pembangunan yang diterapkan pemerintahan Soeharto. Dalam skala nasional, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) muncul sebagai representasi gerakan lingkungan hidup yang mendorong jaringan-jaringan kelompok kerja lingkungan hidup. WALHI terwujud dari campur tangan pemerintah yang mewadahi koalisi sepuluh organisasi non pemerintah yang bergerak dalam lingkungan hidup. Namun, justru pada kurun waktu tersebut terjadi proses pembekuan gerakan-gerakan lingkungan hidup dengan berbasis masa, menjadi gerakan lingkungan hidup tanpa berbasis massa. Gerakan lingkungan hidup tanpa keanggotaan ditambah dengan program yang tidak jelas, membuat gerakan lingkungan hanya merupakan representasi dari aksi hegemoni negara terhadap isu-isu lingkungan hidup. Kader gerakan lingkungan pada periode tahun 1980-an lebih berperan sebagai “kepanjangan tangan” pemerintah dalam melakukan sosialisasi program-program pembangunan dibandingkan sebagai gerakan yang menyuarakan kehendak untuk melindungi kepentingannya dari dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau Negara.

Pada masa itu, kader lingkungan direkrut oleh pemerintah dengan program dan sasaran program yang telah ditentukan oleh otoritas pemerintah. Pola rekrutmen tidak didasarkan pada *voluntary*. Ikatan yang dibangunpun cenderung berupa ikatan struktural (vertikal), dimana kader lebih banyak merujuk pada perintah dari otoritas pemerintahan dari pada inisiatif sendiri. Hal ini dapat dilihat dari surutnya kinerja para kader tersebut ketiga tidak ada lagi program-program yang ditentukan oleh otoritas pemerintahan.

Pasca gerakan reformasi, tepatnya pada awal tahun 2002 muncul kembali gerakan lingkungan hidup yang berbasis massa. Gerakan lingkungan hidup tersebut dipelopori oleh aktivis beberapa LSM, diantaranya Uli Peduli dan Pusdakota. Aktivis LSM melakukan rekrutmen dan pembinaan berbasis masyarakat melalui program lingkungan berbasis komunitas. Program ini pertama kali dilaksanakan di Kota Surabaya, dan berhasil mendorong berkembangnya kelompok kader lingkungan yang aktivitas gerakan lingkungannya dilakukan secara mandiri tetapi mengedepankan keterlibatan komunitas dalam menetapkan target-target hasil yang ingin dicapai. Data yang dilansir Harian *Surya* (26 Desember 2009), tercatat sekitar 26.000 orang kader lingkungan dan 400 fasilitator lingkungan di kota Surabaya. Artinya, kelompok kader lingkungan ini merupakan wujud gerakan lingkungan hidup yang berorientasi pada basis massa.

Gerakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kader lingkungan di Kelurahan Jambangan, berawal dari masalah lingkungan hidup yang terjadi di Surabaya pada tahun 2001. Pada saat itu, Kota Surabaya dipenuhi sampah yang menggunung pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di seluruh wilayahnya,

sebagai akibat dari kapasitas TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Keputih yang tidak lagi memadai. Pada Saat itu, masalah sampah tersebut menjadi masalah publik yang “besar” karena proses relokasi TPA justru memunculkan konflik antar warga masyarakat. Masalah tersebut menarik perhatian para aktivis LSM, pemerintah, dan warga masyarakat untuk secara bersama-sama, mencari solusi dalam menyelesaikan masalah sampah di Kota Surabaya. Beberapa LSM, seperti Uli Peduli dan Pusdakota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, menyelenggarakan program gerakan lingkungan berbasis komunitas dengan cara merekrut para kader lingkungan untuk dapat mengadvokasi masyarakat dan juga pemerintah dalam melakukan aktivitas peduli kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi masalah sampah dan kebersihan lingkungan yang pada saat itu telah menjadi masalahh publik. Tanpa disadari, ternyata sampah (sebagai masalah privat) yang telah dibuang keluar rumah, telah menciptakan masalah publik yang pelik dan kompleks.

Buku Inspirasi dari Jawa Timur, yang ditulis oleh tim dari Yayasan Unilever Peduli (Ramdhani dkk, 2010:32), mengungkap bahwa komitmen awal dari para kader lingkungan adalah (1) memilah dan mengelola sampah, (2) menciptakan lingkungan hijau, dan (3) mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Komitmen itu yang mendorong para kader untuk menciptakan berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Namun aktivitas-aktivitas yang dilakukan hampir tidak mungkin menghasilkan apa yang diharapkan, jika tanpa keikutsertaan warga masyarakat. Maka, mulailah aktivitas pengelolaan lingkungan itu dilakukan dengan menggerakkan dan memobilisasi warga masyarakat dan membangun perasaan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Munculnya kader lingkungan didorong oleh ide yang digagas oleh lembaga swadaya masyarakat yang mengusung isu-isu global, seperti lingkungan hidup, HAM, keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Dua diantaranya yang bergerak di bidang lingkungan adalah Uli Peduli dan Pusdakota. Para kader terlibat dalam aktifitas program pemilahan sampah secara sukarela. Para kader lingkungan mendeskripsikan dan mengaktualisasikan secara mandiri program-program yang ingin dijalankan. Artinya, program-program yang dilakukan berasal dari pemikiran dan partisipasi masyarakat yang diakomodasi oleh para kader. Ikatan sosial yang dibangun adalah ikatan horisontal diantara anggota kader dan anggota masyarakat yang lain. Oleh karenanya eksistensi kader lingkungan ditentukan dari segi kuantitas dan kualitas proyek-proyek yang dijalankan, telah mengarah pada satu "gerakan" kritis emansipatoris yang berpusat pada *civil society*.

Wujud "gerakan" kritis itu lebih berorientasi pada upaya menciptakan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan problem sampah yang pada saat itu merupakan salah satu masalah publik. Kelompok kader lingkungan menjadi penggerak warga masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dan upaya-upaya lain dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kerangka demokrasi, hal itu merupakan dorongan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah publik.

Terdapat dua hal yang dapat dicermati sebagai fakta dalam realitas tersebut. Pertama, bahwa kelompok kader lingkungan telah terlibat dalam upaya menyelesaikan masalah sampah yang telah menjadi masalah publik. Kedua, dengan mengajak warga masyarakat secara simultan dan terus-menerus untuk ikut

dan terlibat dalam aktifitas tersebut. Fakta pertama, menggambarkan partisipasi kader lingkungan, sedangkan fakta kedua menggambarkan dorongan kelompok kader lingkungan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam konteks relasi politik warganegara, apa yang dilakukan oleh kelompok kader lingkungan merupakan wujud dari partisipasi demokratis dan toleransi sipil dari warganegara yang aktif. Hal tersebut selaras dengan konsep komunitas yang dikemukakan oleh Anthony Giddens (2002:91), bahwa komunitas merujuk pada sarana-sarana praktis untuk membantu renovasi sosial dan material lingkungan tempat tinggal, kota, dan area lokal. Aktivitas-aktivitas kelompok lokal yang mendorong prakarsa dan keterlibatan lokal menunjukkan adanya pembaharuan komunitas. Tema komunitas merupakan suatu yang fundamental bagi politik baru (Giddens,2002:91). Masyarakat yang refleksif ditandai dengan tingkat pengorganisasian yang tinggi pada kelompok-kelompok masyarakat. Pengorganisasian itu yang menciptakan partisipasi dan kepedulian politik di tingkat lokal, dimana energi komunal mengarahkan tujuan komunal kearah yang lebih luas melalui cara yang menguntungkan komunitas lokal maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kelompok kader lingkungan pada awalnya melakukan pengorganisasian sosial melalui kegiatan pengelolaan sampah, namun energi komunal yang berkembang telah mengarah pada kegiatan dan aktivitas ekonomi dan politik. Hal itu ditandai dengan adanya disparitas pada interaksi yang dilakukan dengan berbagai institusi pemerintah, organisasi politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Aktivitas pekerjaan sukarela telah meluas menjadi suatu aktivitas partisipasi publik. Inglehart menyebut tersebut dengan pascamaterialis

(Giddens,2002:93), dimana kelompok-kelompok kecil dengan keterbatasan dan masalahnya mampu memberdayakan diri sendiri dan dengan sungguh-sungguh membuktikan kayanya kehidupan masyarakat. Kekayaan tidak hanya dimaknai sebagai akumulasi materi dan kekuasaan tetapi juga merupakan akumulasi dari kepedulian serta dukungan sebagai unsur dasar dari partisipasi.

Tuntutan reformasi telah membuka peluang masyarakat untuk berpikir dan bertindak semakin kritis dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang telah menyimpang dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semua itu terjadi akibat berkembangnya *intelegency public opinion* masyarakat yang menyuarakan *good government*, transparansi dan akuntabilitas. Pada saat hampir bersamaan negara mengalami pelemahan kekuasaan sebagai akibat dari berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat dan menguatnya ketegangan diantara institusi-institusi politik di dalamnya, sehingga mekanisme pembangunan menjadi terhambat. Hal itu mendorong *local self empowering* pada elemen-elemen masyarakat yang memungkinkan terbukanya ruang publik bagi pengembangan masyarakat sipil.

Eksplorasi mengenai gambaran pengembangan masyarakat sipil dapat diejawantahkan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas politik praktis. Masyarakat madani atau *civil society* memainkan peran penting dalam proses eksplorasi gagasan, praktek demokrasi, hingga pendidikan demokrasi di kalangan publik. Kelompok masyarakat madani dapat merefleksikan konsistensi independensi, komitmen, dan tindakan-tindakan yang mendukung nilai-nilai keadilan dan kebajikan (Ali:2003). Proses *societal learning* yang melibatkan interaksi kolaboratif dalam proses pembentukan

jaringan antara birokrasi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas, dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan struktur vertikal maupun horizontal. Simbiosis melalui proses *networking* diyakini sebagai sebuah model pembangunan alternatif (Friedmann, 1998).

Gambaran itu dapat ditemukan dalam pola relasi yang dikembangkan oleh kelompok kader lingkungan di Surabaya. Hasil penelitian Jatningsih (2008), mengungkap usaha-usaha kader lingkungan di Kelurahan Jambangan dalam menyelesaikan masalah sampah telah menciptakan suatu ikatan sosial yang memunculkan *moral order*. Pengelolaan sampah telah menjadi satu gerakan sosial di tingkat lokal (kelurahan hingga kota) yang membangun kesadaran kolektif. Para kader sebagai representasi masyarakat "bawah", menemukan identitas baru dalam menjalin relasi dengan unsur masyarakat "atas". Bagi para kader lingkungan keberadaannya adalah nyata dan benar-benar menjadi kenyataan ketika unsur-unsur masyarakat yang lain "bersedia" menjalin relasi kerja yang kontinyu. Aktivitas kader lingkungan adalah wujud dari aktivitas yang muncul dari adanya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik.

Kapasitas negara, partisipasi masyarakat, dan desentralisasi, merupakan tiga konsep kunci yang dirumuskan oleh *World Development Report* (1997:42) dalam upaya "membawa negara lebih dekat dengan rakyatnya" (*bringing the state closer to the people*). Ketiga konsep tersebut punya kaitan erat dengan penyelenggaraan negara melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, karena proses elektoral ini tidak sanggup menjangkau secara periodik informasi tentang preferensi yang

berkembang dalam masyarakat. Alternatifnya adalah penggunaan wadah diluar pemilihan umum, melalui organisasi sukarela maupun NGO. Dinamika partisipasi masyarakat dapat terefleksi secara nyata pada proses desentralisasi politik ditingkat lokal, diantaranya pada proses agregasi politik yang terepresentasi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pilkada langsung dimaknai sebagai wahana bagi publik untuk mengartikulasi dan menjamin aspirasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan memberikan ekspektasi bagi masyarakat dalam menentukan masa depan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik daerah untuk lima tahun ke depan. Prinsipnya, bukan hasil pilkada yang menjadi unsur dominan melainkan pada proses pembelajaran nilai-nilai dan praktek demokrasi pada aras lokal. Kepala daerah terpilih seharusnya merupakan representasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kepala daerah merupakan sosok yang dikenal kapabilitas dan aktivitasnya oleh masyarakat pemilihnya. Proses itu yang ingin dibidik dalam penelitian ini, melihat keterlibatan politik kelompok-kelompok partisipatoris itu dalam fragmentasi politik di tingkat lokal.

Menurut Arbi Sanit (2002:165), berakhirnya rezim otoriter, secara otomatis meminta kehadiran yang sebesar-besarnya peran partai politik yang secara hakiki merupakan representasi politik masyarakat. Realitasnya tugas partai politik belum terwujud sebagaimana yang menjadi tuntutan. Belum berfungsinya parpol sebagaimana seharusnya menghendaki adanya kekuatan alternatif, dan organisasi sosial serta LSM secara historis telah memperlihatkan fungsi alternatifnya dalam melakukan hal itu. LSM dan ormas memposisikan diri sebagai kekuatan masyarakat yang mampu membangun posisi tawar politik

masyarakat di hadapan negara. Kemampuan utamanya adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, membangun kekuatan politik, ekonomi sosial dan budaya.

Pada masyarakat pascamodern, gejala-gejala munculnya partisipasi politik tidak hanya dapat muncul pada organisasi dan komunitas politik namun justru berkembang pula pada komunitas-komunitas lain yang tidak memiliki afiliasi politik selain sebagai warganegara. Jumlah kader lingkungan kota Surabaya yang cukup besar, cukup potensial untuk mendukung kekuatan politik tertentu, tetapi yang lebih potensial adalah pengaruh yang dapat dilakukan para kader sebagai *opinion leader*. Penelusuran tentang aktivitas dan interaksi yang terjadi antara kelompok kader lingkungan dan aktor-aktor politik (baik dari unsur pemerintah maupun partai politik) diperlukan untuk memahami pola-pola interaksi politik yang dikembangkan oleh para aktor politik maupun presentasi politik yang ditunjukkan oleh konstituennya (warganegara).

Gejala politisasi aktivitas sosial merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, penelitian tentang demokrasi telah berkembang pada kearah kajian tentang konteks-konteks sosial-budaya dalam representasi politik. Isu-isu tentang politik identitas, politik agama, politik komunitas, dan sebagainya merupakan bagian dari perkembangan kajian tentang demokrasi dalam konteks-sosial budaya. Stabilitas demokrasi sangat ditentukan oleh budaya politik yang dikembangkan oleh masyarakatnya (Almond dan Verba, 1990:403). Praktek-praktek politik warga negara adalah tema yang ingin diungkap dalam penelitian ini. Kebudayaan warganegara mempertahankan keseimbangan

dan tanggung-jawab menandakan sebuah titik lebih lanjut tentang politik demokrasi.

Penelitian ini mencoba mengkaji praktek demokrasi yang berkembang di tingkat lokal, yang melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai salah satu aktor politik di tingkat lokal. Kelompok kader lingkungan Kelurahan Jambangan merepresentasikan sebagai unit masyarakat sipil. Oleh karenanya keberadaan kader lingkungan dalam proses demokrasi di tingkat lokal merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Terutama dalam kerangka pengembangan ilmu (khususnya ilmu politik) dan upaya menemukan formulasi budaya warganegara yang beradab.

1.2. Masalah Penelitian

Penelitian ini mengkaji proses munculnya partisipasi politik warganegara, dalam hal ini adalah proses partisipasi politik kelompok kader lingkungan di Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan, dalam keikutsertaannya menyelesaikan masalah sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya. Fokus penelitiannya adalah :

1. Bagaimana kepentingan yang diperjuangkan kelompok kader lingkungan Kelurahan Jambangan dalam penyelesaian masalah sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya?
2. Bagaimana partisipasi politik yang dilakukan kelompok kader lingkungan dalam proses penyelesaian masalah sampah dan kebersihan lingkungan?

1.3. Tujuan penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami proses munculnya partisipasi warganegara dalam proses demokratisasi. Mencari fakta-fakta yang menggambarkan praktek-praktek demokrasi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk dapat menemukan berbagai isu dan kepentingan yang mendasari aktifitas partisipatif kelompok kader lingkungan Kelurahan Jambangan dalam menyelesaikan masalah sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya..
2. Untuk mendapatkan pemahaman tentang proses partisipasi politik yang dilakukan kelompok kader lingkungan dalam proses penyelesaian masalah sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian tentang demokrasi dan politik warganegara, khususnya pengembangan tentang konsep-konsep partisipasi, kesadaran, dan

kepedulian politik masyarakat sipil dalam konteks sosial-budaya Indonesia. dan sebagai bahan kajian atau referensi rujukan akademis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun aktor-aktor politik dalam menciptakan arena komunikasi bersama masyarakat dalam ruang publik. Program-program pemerintah dan perkembangan politik seyogyanya dapat bersinergi dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, dan memanfaatkan hasil dari penelitian ini sebagai gambaran kekuatan/modal sosial yang ada dalam masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam aktif. Termasuk diantaranya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menguatkan kesadaran politik dalam masyarakat urban, dalam mengatasi masalah publik.